



KR-Antara/Yusuf Nugroho/aww
KIRAB RITUAL BWEE GEE: Peserta mengikuti prosesi Kirab Ritual Bwee Gee di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (8/1). Ritual menjelang Hari Raya Imlek yang diikuti ribuan warga Tionghoa dari 48 perwakilan Klenteng se-Indonesia itu sebagai ungkapan syukur kepada Dewa Bumi serta harapan agar Indonesia tetap damai dan aman dari bencana.

Proporsional Sambungan hal 1

era reformasi. "Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga.

Kedua, delapan parpol sepakat, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. "Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem," paparnya.

Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

"Kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi," kata Airlangga.

Tujuh elite partai politik bergandengan tangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Hotel Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023). Delapan parpol Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat membaca pernyataan sikap delapan parpol yang menolak Sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memang mendukung sistem proporsional tertutup diterapkan dalam Pemilu.

Namun, tegasnya, PDIP hingga saat ini taat asas dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Ia sendiri menghormati sikap delapan partai politik yang ada di DPR dalam menolak sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dalam demokrasi di Indonesia.

Bertemunya delapan ketua umum yang menolak sistem proporsional tertutup juga dinilainya hal yang lumrah. Apalagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kerap melakukan hal yang serupa. "Megawati melakukan pertemuan dengan para ketua umum parpol tidak dalam pengertian terbuka. Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara itu justru dalam suasana yang kontemplatif, itu yang membedakan," ujar Hasto.

PDIP tengah disibukkan dengan persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, yang nantinya dirayakan pada 10 Januari. Namun menurutnya, sistem proporsional terbuka justru menghadirkan biaya politik yang tinggi. **(Ant/Obi)-f**

Tak Ada Sambungan hal 1

Dalam kesempatan itu, Menag menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salman dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat. "Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," jelas Menag Yaqut Cholli Qoumas.

Kuota itu terdiri 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini mendapat 4.200 kuota. Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur pendaratan (*landing*) pesawat di Jeddah dan Madinah serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati, tidak adanya pembatasan usia.

Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun. "Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas dapat berangkat haji tahun ini," ujarnya.

Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Menag, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Ia mengatakan, antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Pihaknya, berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia, sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji. "Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman dan Bapak Menteri Haji," katanya.

Menteri Tawfiq mengaku sangat senang bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah

negara penting bagi Arab Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan *syarikah* atau perusahaan. Ada enam syarikah yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Dengan begitu, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian. **(Ati)-f**

'Banjir' Sambungan hal 1

Sebagai contoh, dalam satu dasawarsa 2000-2020 beberapa daerah di belakang Kota Semarang (Kedungsepur : Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi) mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan yang luar biasa cepatnya. Pertumbuhan penduduk perkotaan di dua Kabupaten Kendal dan Demak sangat cepat karena merupakan rangkaian koridor yang nyaris menjadi satu dengan Kota Semarang untuk membentuk megarurban. Realita ini tampaknya terkait pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, yang cenderung membentuk sebuah formasi berbentuk *extended metropolitan region* (EMR). Yang dicirikan pertumbuhan di kota-kota inti yang meluber ke kawasan peri-peri di sekitarnya (Firman, 2003, McGee, 1989).

Pertumbuhan ini dapat dipahami. Investor mulai émelebarakan sayapnya di daerah pinggiran guna mengembangkan basis industrinya dengan harapan mendapatkan lahan yang murah dan jauh dari kemacetan lalu lintas. Namun bagai pepatah *ada gula ada semut*, lokasi industri baru tersebut umumnya akan diikuti dengan pendirian fasilitas penunjang.

Mulai perumahan karyawan, warung makan, toko, pasar, dan sebagainya yang terus diikuti pertumbuhan selanjutnya.

Pertumbuhan penduduk di koridor Kendal-Semarang-Demak tersebut juga diikuti pertumbuhan ekonomi yang ternyata telah banyak berdampak terhadap rusaknya lingkungan di koridor tersebut. Sebanyak 96,95% hutan bakau atau *mangrove* di Pantai Utara Jawa rusak berat. Ini karena alih fungsi lahan *mangrove* menjadi tambak, permukiman, pariwisata dan industri.

Selain itu, reklamasi disinyalir mengubah arah ombak dan mengakibatkan abrasi dan akresi (tanah timbul). Tanah yang terkena abrasi umumnya di sebelah kanan lahan reklamasi dan yang akresi ada di sebelah kiri. Padahal pembangunan akan *sustainable* jika di dalamnya memberikan generasi mendatang *income* dan *opportunity* pertumbuhan *capital*, minimal sama dengan generasi sekarang (World Bank dalam Nugroho, 2000).

Modal-modal tersebut dapat berupa *human capital* (pendidikan, kesehatan, gizi), *social capital* (fungsi

dan kelembagaan, serta budaya masyarakat), *natural capital* (sumberdaya alam dan lingkungan), serta *man-made capital* (investasi yang umumnya terhitung dalam anggaran perekonomian). Jika modal-modal tersebut tidak dapat saling berinteraksi secara sehat dan seimbang, maka yang terjadi adalah bencana.

Ibarat penyakit, *banjir bandhang* adalah penyakit komplikasi, dan penanganannya harus komprehensif. Mulai darai penegakkan hukum pelanggaran tata ruang, normalisasi sungai dan drainase. Juga penanaman mangrove di Pantai Utara, penghentian penyedotan air tanah dalam yang menyebabkan penurunan muka tanah, dan sebagainya.

Banjir bandhang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak *sustainable* atau berlanjut, karena rusaknya lingkungan. Sehebat apapun pertumbuhan ekonomi akan sia-sia jika alam sudah tidak mau lagi bersahabat. Apalagi justru kita eksploitasi. Ironisnya atas nama pembangunan. (*Penulis adalah pengajar MK Lingkungan Hidup, Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Tengah*)-f

PEMPROV JATENG BANGUN TALUT DARURAT
Pengungsi Banjir Kudus Capai 1.128 Jiwa

KUDUS (KR) - Jumlah warga yang mengungsi akibat banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, semakin bertambah karena saat ini mencapai 1.128 jiwa. "Sehari sebelumnya jumlah pengungsi hanya 1.081 jiwa, hari ini Minggu (8/1) bertambah menjadi 1.128 jiwa. Sedangkan desa terdampak sebanyak 29 desa," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Munaji di Kudus, Minggu (8/1).

Menurut Munaji, data pengungsi akan terus dimutakhirkan, terlebih curah hujan mulai berkurang. Dari ratusan warga yang mengungsi tersebut, di antaranya dari Kecamatan Mejobo ada sembilan desa, dari Kecamatan Jati lima desa, Kecamatan Undaan ada empat desa, Kecamatan Kaliwungu ada tujuh desa, Kecamatan Jekulo juga ada empat desa.

Mengenai tempat pengungsian, Munaji menjelaskan, ada 12 lokasi pengungsian. Di antaranya ada yang menempati Gedung DPRD Kudus, tempat ibadah, balai desa, Gedung PKK, SD ser-

ta TPQ. Selain menggenangi permukiman penduduk, banjir juga menggenangi areal persawahan di lima kecamatan dengan total luas areal sawah mencapai 8.095 hektare.

Sementara itu Pemprov Jawa Tengah mendatangkan 1.000 sak limbah batubara dari PLN di Kabupaten Jepara untuk membangun talut darurat pada Sungai Babon yang jebol sehingga mengakibatkan banjir di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, pada Jumat (6/1) petang.

"Alhamdulillah, dari PLN, limbah batubara yang ada di Jepara saat ini sudah dikirim dan Insya Allah hari ini juga langsung datang 1.000 sak, dan akan langsung dipasang," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengenai penanganan pascabanjir di Perumahan Dinar Indah, Semarang.

Wagub memohon maaf kepada seluruh masyarakat Jateng atas bencana alam yang terjadi di beberapa daerah akibat cuaca buruk. **(Ant/Trq/San)-f**

BMKG Sambungan hal 1

Ahmad Yani Semarang menyebutkan, pada 9 Januari kondisi cuaca ekstrem antara lain berpeluang terjadi meliputi bagian wilayah Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta Kabupaten dan Kota Semarang.

Selama kurun itu, kondisi cuaca ekstrem juga diprakirakan meliputi bagian wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal, Blora, Pati, Kudus, Grobogan, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan sekitarnya.

Pada 10 Januari, menurut prakiraan BMKG, cuaca ekstrem berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten dan Kota Semarang, serta Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Pemalang, Batang, Kendal,

Rembang, Blora, Pati, Kudus, dan sekitarnya. Bagian wilayah Kabupaten Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, dan sekitarnya juga diprakirakan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada 11 Januari.

Teguh menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem dapat dipicu oleh beberapa faktor, termasuk dinamika Atmosfer serta suhu muka laut yang relatif hangat dengan nilai anomali 0,5 hingga 2,5 derajat Celsius di Laut Jawa yang dapat meningkatkan potensi penguapan atau penambahan massa uap air.

"Kelembapan udara yang relatif cukup tinggi dan labilitas lokal yang cukup kuat turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia, khususnya Jateng," katanya.

Menurut Teguh, faktor-faktor tersebut dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di bagian wilayah Jawa Tengah dari 9 sampai 11 Januari 2023. **(Ant/San)-f**

Harga Sambungan hal 1

kenaikan, jadi belum turun. "Saat ini harganya (harga beras) malah naik. Jadi belum turun, karena naik terus, tiap naik, rata-rata kenaikan Rp 200 sampai Rp 500," ungkapnya.

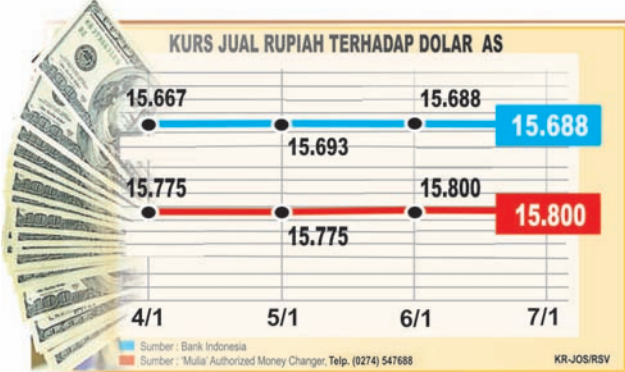
Sebelumnya, pada Sabtu (7/1) malam sekitar pukul 21.00 WIB Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo menikmati malam bersama keluarga menaiki andong berkeliling Jalan Malioboro Yogya. Dengan menggunakan andong berwarna hitam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama cucunya, Jan Ethes dan La Lembah Manah berangkat dari Gedung Agung menuju Malioboro. Turut serta putra sulung Jokowi, Gibran

Rakabuming Raka dan istri Selvi Ananda turut menaiki andong yang sama.

Suasana di Malioboro tampak ramai, tidak sedikit masyarakat memanggil Presiden dari kejauhan dan dibalas dengan lambaian tangan serta sapaan Presiden beserta keluarga dari atas andong.

"Pak Jokowi... Pak Jokowi..., teriak masyarakat dengan antusias menyambut kedatangan Kepala Negara dan keluarga.

Khoiril, kusir andong yang membawa Presiden dan keluarga mengaku senang bisa mengantar Presiden berkeliling Malioboro dengan andongnya. "Saya merasa bangga dan beruntung, karena baru pertama ini (mem-



Prakiraan Cuaca				Senin, 9 Januari 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C
Bantul					23-31
Sleman					23-30
Wates					23-31
Wonosari					23-30
Yogyakarta					23-31
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Petir	

Inovasi Program Pembiayaan Perumahan bagi MBR Informal



Fitri Juniwati Ayuningtyas, SE MEdDev
Sekretaris Prodi Ekonomi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menjadi permasalahan utama di Indonesia.

Permasalahan tersebut disebabkan karena harga rumah yang semakin mahal sebagai akibat dari keterbatasan lahan yang tersedia, khususnya yang berlokasi di perkotaan dimana masyarakat membutuhkan lokasi yang strategis untuk mencari penghasilan. Kondisi ini mendorong munculnya permasalahan backlog hunian. Jumlah backlog kepemilikan perumahan saat ini menunjukkan angka 11 juta unit sedangkan backlog keterhunan mencapai 7,6 juta unit. Sebesar 93 persen dari angka backlog kepemilikan perumahan, sebanyak 33 persen berasal dari MBR yang didominasi oleh MBR informal, sementara itu sebanyak 60 persen berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu.

Tingginya angka backlog tersebut dapat disebabkan karena kurangnya fasilitas pembiayaan perumahan baik dari pemerintah maupun swasta. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan backlog ini adalah melalui realisasi pembangunan perumahan dengan harga yang terjangkau serta skema pembiayaan yang tepat. Pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya informal atau yang memiliki pendapatan tidak tetap (non fix income) hendaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. MBR informal menurut BPS terbagi menjadi tujuh kategori yaitu Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/Karyawan, Pekerja Bebas di Pertanian, Pekerja Bebas di Nonpertanian, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar.

MBR informal diketahui memiliki kendala untuk mendapatkan rumah layak sebagai akibat terbatasnya layanan perbankan sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan perumahan seperti KPR. Hal ini disebabkan karena MBR informal tidak memiliki slip gaji yang diperoleh dari penghasilannya, walaupun mereka memiliki kemampuan bayar yang cukup tinggi. Solusinya adalah pemerintah perlu merancang pemetaan risiko terhadap MBR informal secara tepat untuk mengetahui seberapa besar risiko pembiayaan yang dihadapi. Selain itu, pemetaan risiko juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi perbankan dalam mengelompokkan pembiayaan perumahan sesuai dengan profil risiko masing-masing MBR informal untuk menghindari terjadinya risiko

gagal bayar oleh debitur.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa sebesar 59,95 persen, masyarakat bekerja pada sektor informal dimana sebanyak 74 persen diantaranya belum memiliki rumah dan sisanya sejumlah 26 persen telah memiliki rumah. Sementara itu, dari 74 persen yang belum memiliki rumah, sebanyak 42 persen ingin membangun rumah sendiri. Dengan demikian, pembiayaan perumahan bagi golongan MBR informal merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah kedepannya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR melakukan inovasi pengembangan pembiayaan perumahan untuk memberikan kemudahan pemilihan rumah layak huni bagi MBR informal yang bekerjasama dengan stakeholders

terkait.

Bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023 akan dialokasikan melalui beberapa Program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Tapera, termasuk untuk melunasi pembayaran Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya yaitu senilai Rp30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah. Alokasi dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk memfasilitasi KPR FLPP sejumlah 220.000 unit rumah tahun 2023 diberikan senilai Rp25,18 triliun, sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sejumlah 10.000 unit.

Pembiayaan perumahan MBR informal pada tahun 2023 akan difokuskan pada skema saving



plan yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Skema tersebut diharapkan dapat memberikan peluang dan kemudahan bagi MBR informal untuk memperoleh rumah layak dengan syarat menabung di Tapera selama 3-6 bulan. Sementara itu target kepersertaan Tapera yang berasal dari pekerja mandiri yang bekerja sama dengan komunitas atau pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 30.000 orang di tahun 2023. Selain itu Kementerian PUPR juga menargetkan pengembangan pembiayaan perumahan bagi MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing. ***